



**METAMORPOSIS SYI'AH: ANTARA POLITIK, MAZHAB, TEOLOGI DAN
KONSEP NEGARA TEOKRASI**

*(The Metamorphosis of Shia: Between Politics, Schools, Theology and the Concept of a
Theocratic State)*

Tabhan Syamsu Rijal and Rahmi Dewanti Palangkey

Universitas Bosowa, Makassar

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: jho.nani76@gmail.com

(Received 23 August; Revised 27 August; Accepted 28 August 2021)

Abstract

As a theological school that believes in the infallibility of the Twelve Imams from the descendants of the Prophet Muhammad, Shia has created a theological conflict among Muslims, especially the Sunni sect which from the beginning of Islamic history has opposed infallibility of other than the Prophet Muhammad. The friction between Shi'ism and other sects in Islam is due to theological contradictions and is initiated by political differences and schools of thought that have further narrowed the movement for the unification of Muslims to this day. In building trust among Muslims, the Shia elite offered a theo-democratic political concept called the al-Faqih region, which is still a question mark whether it can be adopted outside the Shia region. This study uses a descriptive-analytic qualitative method with a library research approach that focuses on studying manuscripts and texts from various works of literature regarding the development of Shia politics, schools and theology, and facts about the political concept Wilayatul al-Faqih theo-democracy, which is the current Shia political ideology. The results of the study found that the differences in political sects, schools and theology between Shia and Sunni in particular further broaden the conflict between schools and create sensitivity between followers of Islam, and at the same time get a strong rejection of the political concept of theo-democracy of the al-Faqih region if it is tried to be applied. Outside Shia-majority areas. The implications of this research are: 1) Efforts to prove the truth of certain schools of thought and the falsehood of other schools must be avoided because religious doctrines are sacred and susceptible areas so that their intersection can lead to war. 2) Certain parties have exacerbated the historical Sunni-Shi'a conflict, which is no longer relevant to be brought up, either because the time span is quite long until 14 centuries ago, it is also impossible to return their rights if there are rights that are taken away. 3) The importance of building an understanding of views among followers of a school of thought about one ummah, bound by belief in the same God, Prophet and Al-Qur'an, so that all differences can be removed. And to all adherents of the sect to show commitment to respecting the ideology and symbols that are sacred by each faction and to put forward the politics of coexistence, namely; live side by side in harmony, accept differences in furu'iyah or even creed and interact with each other on the basis of mutual interest.

Keywords: Shia, Sunni, Politics, School, Theology, Al-Faqih Wilayah Region

Abstrak

Syiah sebagai sebuah aliran teologi yang meyakini kemaksuman para Imam Dua Belas dari keturunan Rasulullah Saw telah menimbulkan pertentangan teologi di kalangan umat Islam, khususnya aliran Sunni yang dari awal sejarah Islam telah menentang kemaksuman selain Rasulullah Saw. Pergesekan antara Syiah dan aliran lain dalam Islam bukan saja karena pertentangan teologi, tapi diawali oleh perbedaan politik dan aliran mazhab yang semakin mempersempit gerakan penyatuan umat Islam hingga dewasa ini. Dalam membangun kepercayaan di kalangan umat Islam, kaum elit Syiah menyodorkan konsep politik teodemokrasi yang disebut wilayah al-Faqih yang tentu saja masih menjadi tanda tanya bisa tidaknya diadopsi di luar dari wilayah Syiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitik dengan pendekatan library research yang

terfokus pada studi naskah dan teks dari berbagai literatur mengenai perkembangan Syiah secara politik, mazhab dan teologi serta fakta-fakta tentang konsep politik teodemokrasi Wilayatul al-Faqih yang menjadi ideologi politik Syiah saat ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa perbedaan aliran politik, mazhab dan teologi antara Syiah dan Sunni secara khusus semakin memperluas pertentangan antar mazhab dan menciptakan sensitivitas antar pemeluk agama Islam, dan pada yang saat yang sama mendapatkan penolakan keras atas konsep politik teodemokrasi wilayah al-Faqih jika berusaha diterapkan di luar wilayah mayoritas Syiah. Implikasi dari penelitian ini adalah : 1) Upaya pembuktian tentang kebenaran doktrin mazhab tertentu dan batilnya doktrin mazhab lainnya sudah harus dihindari, sebab doktrinitas agama adalah wilayah sakral dan sangat sensitif, sehingga persinggungannya bisa mengantarkan peperangan. 2) Terdapat pihak tertentu semakin memperuncing konflik historis Sunni-Syi'ah yang tidak lagi relevan untuk diungkit, baik karena rentang waktunya yang cukup panjang hingga 14 abad yang lalu, juga mustahil untuk dikembalikan haknya jika terdapat hak yang dirampas. 3) Pentingnya membangun kesepahaman pandangan antarpemeluk mazhab tentang umat yang satu, diikat oleh keyakinan akan Tuhan, Nabi dan al-Qur'an yang sama, sehingga segala perbedaan bisa ditanggalkan. Dan kepada seluruh pemeluk mazhab untuk menunjukkan komitmen menghormati ideologi dan simbol-simbol yang disakralkan oleh masing-masing faksi serta mengedepankan politik koeksistensi yaitu; hidup berdampingan secara harmonis, menerima perbedaan furu'iyah atau bahkan akidah serta berinteraksi satu sama lain atas dasar mutual interest (kepentingan bersama).

Kata kunci: Syi'ah, Sunni, Politik, Mazhab, Teologi, Wilayah al-Faqih

PENDAHULUAN

Perselisihan antara Syi'ah dan Sunni sepanjang sejarahnya tidak lepas dari persoalan Ima>mah (kepemimpinan politik). Dalam pandangan politik Syi'ah, penentuan Ima>mah bukanlah pilihan publik, tetapi merupakan salah satu pilar agama atau asal-usul dan dasar perinsip agama (*arka>n al-Din*), dan menjadi tolak ukur kesempurnaan iman seseorang, sebab seorang muslim menurut pandangan Syiah, tidak bisa dikatakan sempurna imannya kecuali percaya kepada Ima>mah. Karena itu, Imam 'Ali bin Abi> T}a>lib ra., menurut keyakinan Syiah, seharusnya menjadi pelanjut kepemimpinan yang sah dengan penunjukan langsung dari Nabi saw., (bukan kepada Abu> Bakar ra.), dan oleh sebab itu, kedudukan para Imam setara dengan kedudukan Nabi saw. Jadi berdasarkan asumsi di atas, Syi'ah dalam setiap kasus memiliki pendirian bahwa hak politik mutlak dimiliki oleh kalangan Ahlulbait (keturunan Rasulullah Saw).¹

Konflik Syiah-Sunni menemukan momentumnya setelah berhasil memperluas pengaruhnya melalui pendirian dinasti.

Adalah dinasti Umayyah yang didirikan oleh Mu'awiyah bin Abi> Sufya>n (lawan politik 'Ali bin Abi> T}a>lib), tidak lama setelah peristiwa *tah}ki>m* (arbitrase) pada perang S}iffin, sebagai dinasti pertama pasca *Khulafa> al-Rasyidi>n* berpusat di Damakus dari 661-750 M. Setelah masa pemerintahan dinasti Umayyah berdiri dinasti Abbasiyah (750-1258 M) yang didirikan oleh keturunan al-'Abba>s paman Rasulullah saw dan berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Di Cairo-Mesir, berdiri Dinasti Fatimiyah didirikan oleh kelompok Syi'ah Isma>iliyah sebagai tandingan terhadap dinasti Abbasiyah yang memiliki kekuasaan di Afrika Utara dari 909-1171 M dan pusat pemerintahannya berada di Fustat, Cairo hingga ditaklukkan oleh S}alah}uddin al-Ayyu>bi, pendiri dinasti 'Ayyu>biah berpusat di Cairo, Mesir dari 1174-1252 M.

Penyebaran pengikut aliran Syi'ah di dunia saat ini tidak lagi terkonsentrasi di wilayah bekas dinastinya, tetapi berkembang hingga ke Asia Tenggara dan Asia Barat Daya, khususnya di Iran sebagai pusat penyebaran aliran Syi'ah *Is/na> Asyariyah*. Menurut *Pew Research Institute*, dari 1.6 miliar pemeluk agama Islam di dunia saat ini, kalangan Syi'ah mewakili 20% atau sekitar 350 juta jiwa yang pada umumnya

¹Kamaluddin Nurdin Marjuni, Prof. Madya pada Universiti Sains Islam Malaysia, wawancara via whatsapp tanggal 5 September 2020.

(atau sekitar 68-80%), berada di empat negara yaitu; Iran, Pakistan, India dan Irak.

Syiah dan Pelabelannya

Syiah secara etimologi berasal dari kata *syā>ya'a – yusy>aya>'u – syi>'atan* yang berarti pengikut dan pendukung.² Syiah dalam pengertian bahasa sudah dikenal sejak berabad-abad lamanya jauh sebelum datangnya Syariah Islam. Adapun Syi'ah secara terminologi, diantaranya dikemukakan oleh Imam Abu> H}asan al-Asy'ari, sebagai berarti sebuah kelompok atau golongan yang mendukung Imam 'Ali r.a serta menganggapnya lebih utama dari pada sahabat Nabi lainnya.³ Syi'ah dalam pengertian golongan (*firqatu al-Syi>'ah*), tidak keluar dari penamaan sebuah kelompok yang dianggap sebagai pendukung fanatik 'Ali bin Abi> T}a>lib r.a dan keluarganya.⁴ Karena itu, *al-tasyayyu'* adalah mencintai 'Ali bin Abi> T}a>lib dan meninggikan derajatnya dari pada sahabat Nabi lainnya. Siapa saja yang menganggap 'Ali bin Abi> T}a>lib lebih mulia dari pada sahabat Rasulullah lainnya semisal Abu> Bakar dan 'Umar bin Khatta>b maka mereka golongan Syi'ah yang sesat dan dapat dicap sebagai Ra>fid}i, Akan tetapi jika mereka tidak lebih memuliakan 'Ali dari pada kedua sahabat Rasulullah tersebut, maka disebut Syi'ah.⁵

²Muhammad bin Abu> Bakar bin Abdu al-Qadir al-Razi, *Mukhtār as-S}ih}ah* (Cet. I, Beirut: al-Maktabah al-As}riyah, 1995), h. 337. Al-Fairuz Aba>di, *al-Qāmūs al-Mu}j}it*, Jilid 3 (Cet. III, Beirut: Mat}ba'ah al-As}riyah, 1933), h. 47.

³Abu> al-H}asan bin Isma>'il al-Asy'ari, *Maqa>la>t al-Isla>miyyi>n Wa ikhtila>f al-musallin }* (Qahirah: al-Nahdah, 1969), h. 65.

⁴Muhammad Ka>s}i>f al-Gitā, *As}lu al-Syi'ah wa Usju>luha* (Beirut: Da>r al-Adwā, 1991), h. 184.

⁵Ibnu H}ajar, *Muqaddimah Fath}u al-Ba>ri*, Jilid 1 (Qa>hirah: Da>r al-Risa>lah, 2013), h. 442.

Dari uraian di atas, baik pengertian Syi'ah secara etimologi maupun terminologi, dapat diketahui bahwa Syi'ah adalah sebuah golongan dalam Islam yang secara khusus merupakan pendukung setia 'Ali bin Abi> T}a>lib ra., dan meyakini sebagai khalifah/Imam pertama atas dasar nas dan wasiat Nabi serta menaati pemimpin yang diangkat dari keluarga dan keturunannya, baik dalam kehidupan keduniaan maupun keagamaan.

Terdapat perbedaan pendapat tentang awal mula pelabelan dan pemunculan kelompok Syi'ah yang tentu saja kembali kepada perbedaan penamaan Syi'ah dari segi bahasa dan terminologi. 'Ali Sami al-Nasyar, seorang pakar teologi Islam dari Mesir berpandangan bahwa istilah Syi'ah secara bahasa muncul pasca syahidnya khalifah 'Us}ma>n bin 'Affa>n r.a., yakni ketika khalifah keempat umat Islam ini menyatakan pengikutnya adalah Syi'ah. Akan tetapi, di saat yang sama pula, Mu'awiyah yang pada masa itu berselisih dengan 'Ali r.a., juga menamakan pengikutnya dengan sebutan Syi'ah.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa istilah Syi'ah pada waktu itu hanyalah penyebutan secara bahasa, belum menjadi sebuah kelompok (mazhab) keagamaan.

Beberapa tokoh dan penulis Syi'ah berkesimpulan bahwa Syi'ah sudah ada sejak awal Rasulullah menyerukan risalahnya. Adalah Sa'ad al-Qummi (W. 301 H) berkata bahwa golongan Syi'ah yang pertama adalah golongan 'Ali bin Abi> T}a>lib yang disebut "golongan 'Ali" dan sudah ada pada saat Rasulullah saw. masih hidup serta mendapatkan pengakuan setelah wafatnya. Pendapat ini didukung oleh al-Nubakhti⁷ dan al-Kha>sif al-Git}a>.⁸

⁶Ali Sami al-Nasyar, *Nasy'atu al-Fikri al-Falsa>fi fi> al-Isla>m*, Jilid 3 (Qa>hirah: Da>rul Maa>rif, 1968), h. 229.

⁷Al-H}asan bin Musa al-Nubakhti, *Fira>q al-Syi>'ah* (Beiru>t: Mansyu>ra>t al-Rida, 2012), h. 32.

Menurut mereka, sejak Nabi Muhammad saw. masih hidup terdapat beberapa sahabat yang bersimpati kepada 'Ali bin Abi> T}a>lib, karena 'Ali banyak disebut oleh Nabi saw. sebagai orang yang utama, baik dari segi ilmu, keimanan, maupun amal salehnya. Dari salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani, Dari Ummu Salamah ra berkata; Suatu malam saya pernah bersama Rasulullah dan Fatimah bersamaku, kemudian menyusul 'Ali, maka Rasulullah saw. bersabda: "ya 'Ali, engkaulah beserta sahabatmu dan pendukungmu di Surga." Hadis ini tentu tidak menjadi patokan bahwa Nabi mengidentikkan Syiah dengan 'Ali bin Abi> T}a>lib.

Sementara itu, orientalis Montgomery Watt berpandangan bahwa awal mula gerakan Syi'ah terjadi pada hari-hari di tahun 37 H (657 M), ketika sekelompok pendukung fanatik 'Ali bin Abi> T}a>lib pasca perang Shiffin menyerukan "Kami loyal dan tunduk kepada orang yang mendukungmu, namun kami juga benci dan melawan orang yang membencimu", hal itu berarti mereka siap bersikap menerima secara penuh keputusan-keputusan penting yang diambil oleh 'Ali.⁹

Perbedaan pendapat tentang awal mula pelabelan kelompok Syi'ah tidak lepas dari faktor sentimen keagamaan dan isu politik yang melatari kemunculannya. Beberapa penulis sejarah cenderung memetakan penamaan Syi'ah dari sisi keagamaan dan dari sudut pandang politik. Hal itu untuk membedakan penamaan Syi'ah dari wilayah pemahaman akidah dan Syi'ah dari aspek wilayah politik. Ahli Sejarah asal Mesir, Dr. 'Abdul Azi>z al-Dauri, menilai bahwa kemunculan Syi'ah dapat dilihat dari

dua aspek: aspek keagamaan dan aspek politik. Dari sisi aspek keagamaan (akidah spiritual), kemunculan Syi'ah tidak dapat dilihat dari satu aspek saja, karena sejak Nabi Muhammad saw. terdapat beberapa sahabat yang merasa simpati kepada 'Ali bin Abi> T}a>lib atas keutamaan-keutamaannya. Sedangkan kemunculan Syi'ah dari aspek politik ialah setelah meninggalnya 'Ali bin Abi> T}a>lib.¹⁰ Pendapat ini dapat diterima karena kalangan pengikut 'Ali bin Abi> T}a>lib, khususnya empat sahabat yaitu; Salma>n al-Fa>risi, Abu> Zar al-G}ifa>ri, 'Amma>r bin Ya>sir dan Miqda>d bin Aswad memiliki spiritualitas keagamaan yang sangat tinggi dan mendapat pengakuan dari Rasulullah saw.

Menurut kesepakatan ulama dan ahli sejarah Islam, Syi'ah tidak lahir dengan nama, namun lahir dari gerakan politik yang mendukung 'Ali bin Abi> T}a>lib. Maka dari itu, ia baru lahir pasca pemerintahan 'Ali bin Abi> T}a>lib dan bukan pada zaman Nabi. Bahkan menurut kalangan Mu'tazilah, Syi'ah yang dikenal sekarang ini baru timbul pada masa Imam Ja'far al-S}a>diq (80-148 H).¹¹ Karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian Syi'ah dan pelabelannya sangat terkait dengan periode kemunculan serta fase-fase perkembangan akidah mereka.

Pemikiran politik Syi'ah

Isu politik menjadi sangat menonjol yang mengiringi kelahiran kelompok Syi'ah. Munculnya kelompok Syi'ah tidak dapat dipisahkan dari ide mengenai hak 'Ali dan keturunannya sebagai pihak yang memiliki hak kekhalifahan. Isu itu dikembangkan oleh keluarga besar Bani> Ha>syim, yang

⁹Muh}ammad H}usein al-Kasyf, *As}lu al-Syi>'ah wa Us}u>luha* (Teheran: Muassasah Ima>m 'Ali, t.th), h. 184.

¹⁰W Montgomery Watt, *Islam and the Integration of Society* (London: Routledge, 2008), h. 236.

¹⁰Muh}ammad 'Abdul 'Azi>z al-Dauri, *Muqaddimah fi> al-S}adr al-Isla>m* (Beiru>t: Markaz Dira>sat al-Wih}dah al-Isla>miyah, 2007), h. 71.

¹¹Hamid Fahmy Zarkasyi, *Teologi dan Ajaran Syi'ah Menurut Referensi Induknya* (Jakarta: Insist, 2014), h. 13.

kemudian populer dengan sebutan Ahlulbait. Tuntutan kelompok Ahlulbait untuk menjadi Imam telah disuarakan semenjak sepeninggal Nabi saw. Syi'ah menganggap bahwa jabatan kepala negara bukanlah hak tiap orang Islam dan bukan juga hak tiap orang Quraisy. Bagi mereka jabatan tersebut adalah hak monopoli 'Ali bin Abi> T}a>lib dan keturunannya.¹² Bahkan Abu> Zahrah menilai bahwa Syi'ah adalah mazhab politik dalam Islam yang paling tua dan paling dahulu timbul.¹³ Hal tersebut boleh jadi penyebabnya karena masalah pertama yang timbul dalam konflik di kalangan umat Islam bukanlah persoalan tentang keyakinan melainkan masalah politik.

Sekalipun kelahiran Syi'ah tidak dapat dipisahkan dengan masalah politik, khususnya pasca wafatnya Rasulullah, namun diakui bahwa warna politik Syi'ah pada awal kemunculannya bukan merupakan bentuk pemikiran politik seperti dipahami saat ini; yang memiliki prinsip, metode, cabang, pengikut, kebijakan dan rancangan politik tertentu. Politik Syi'ah pada awal kemunculannya tidak lebih sebagai bentuk dukungan terhadap 'Ali bin Abi> T}alib dan Ahlulbait, sehingga para pengikutnya menentang kelompok yang tidak sejalan dengan Imam 'Ali dan Ahlulbait.

Kelompok Syi'ah berusaha membentuk teori-teori politik mereka atas dasar wahyu dan akal dengan mengajukan konsep imamah (kepemimpinan), *wala>yah* (kepatuhan), dan *'is}mah* (ketidakmungkinan salah) bagi imam. Doktrin Syi'ah ini cenderung menekankan fungsi keagamaan dari pada khalifah. Bagi kalangan Syi'ah, imamah umat Islam pada dasarnya merupakan legitimasi ketuhanan yang ditransmisikan lewat garis Nabi, sehingga legitimasi politik harus berasal dari

legitimasi keagamaan dan ini hanya milik para keturunan Nabi (jalur 'Ali). Karena itu, dalam teori politik Syi'ah dikenal adanya imamah, *wala>yah*, dan *'is}mah* sehingga terkesan tidak bisa dipisahkan antara politik dan teologi.

Syi'ah dan Transformasi Mazhab Ahlulbait.

Dalam sejarah Syi'ah, mazhab Ahlulbait yang dikenal saat ini dengan mazhab al-Ja'fariyah, dinisbatkan kepada Imam Keenam aliran Syi'ah yaitu Ja'far ibn Muḥammad al-Bāqir ibn 'Ali Zainal Ābidīn ibn Husain ibn 'Alī ibn 'Abī Ṭālib al-Hāshimī al-'Alawī (w. 148 H).¹⁴ Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fukaha Sy'iah tentang kapan awal perkembangan mazhab al-Ja'fariyah. Pendapat pertama mengatakan bahwa perkembangan mazhab al-Ja'fariyah dimulai sejak awal Islam, yakni ketika Nabi Muhammad memulai menetapkan hukum. Pendapat kedua cenderung melihat perkembangan mazhab Syi'ah tersebut dimulai dari masa “kegaiban kecil” Imam Mahdi Muḥammad al-Muntaḍar (w. 265H). Namun kajian atas mazhab fikih dalam Syi'ah cenderung berkiblat pada pendapat pertama dari pada pendapat kedua.¹⁵ Hal ini karena menempatkan masa Nabi Muhammad saw dan masa sahabat sebagai bagian dari perkembangan fikih al-Ja'fariyah, serupa dengan periodisasi fikih di kalangan Sunni yang juga menempatkan periode pembentukan hukum masa Nabi dan sahabat sebagai awal periode fikih.

Meski Imam Ja'far dikategorikan sebagai guru dari para Imam (pendiri mazhab), namun corak pemikiran keagamaannya berafiliasi kepada madrasah Ahlulbait yang memiliki pandangan berbeda

¹²Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), h. 97.

¹³Muḥammad Abu Zahrah, *Tari>kh al-Maz}a>hib al-Isla>miyyah* (Beiru>t: Da>r al-Fikr al-'Arabi, 2008), h. 35.

¹⁴Shihāb al-Dīn Abū al-Faḍl Aḥmad ibn 'Alī ibn Hajar al-'Asqalanī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, jilid I (Qahirah: Dār al-Kita>b al-Islāmī, 2004), h. 574.

¹⁵Lihat Abdul Azis Dahal (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3 (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996) h 79.

dengan madrasah *ahlu al-ra'yi* yang diperpegangi oleh Imam Hanafi dan para pengikutnya, dimana Imam Ja'far condong pada madrasah *ahlu al-hadis*. Al-Syahrastani dalam *al-Milal wa al-Nihal* menyebutkan bahwa kedua madrasah tersebut berbeda pendapat dalam berbagai persoalan *furu'iyah* dan masing-masing madrasah menguatkan pendapat mereka melalui kitab-kitab yang ditulisnya, sehingga pada akhirnya berkesimpulan bahwa manhaj yang dipengang masing-masing diyakini kebenarannya tanpa keraguan.¹⁶

Imam Ja'far al-S}adiq (w. 148 H/765M). Segera setelah wafatnya, terjadi konflik di kalangan keturunannya tentang siapa yang harus menjadi Imam berikutnya. Perselisihan tentang suksesi Imam Ja'far ini mengakibatkan perpecahan baru di dalam Syi'ah dan membentuk komunitas utama Syi'ah menjadi dua, yaitu; Syi'ah Isma'iliyah dan Syi'ah *Is/na> Asyariyah*. Kemunculan sekte Isma'iliyah dan *Is/na> 'Asyariyah* terjadi setelah wafatnya Imam Ja'far al-S}adiq (Imam keenam). Sekte Isma'iliyah menyakini bahwa Ismail, putra Imam Ja'far adalah Imam ketujuh yang pantas menggantikan ayahnya yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Imam Ja'far, namun Ismail wafat mendahului ayahnya. Akan tetapi satu kelompok pengikutnya tetap menganggap Ismail adalah Imam ketujuh dan kepercayaan kepada tujuh Imam Syi'ah yang terhenti pada Ismail putra Imam Ja'far tersebut, menjadikan namanya Syi'ah Isma'illiyah atau biasa disebut Syi'ah Sab'iyah.¹⁷ Sedangkan Syi'ah *Is/na> Asyariah* atau lebih dikenal dengan Imamiyah atau kelompok Syi'ah Dua Belas. Kelompok ini mempercayai pengganti Imam Ja'far al-S}adiq adalah putranya Musa al-Ka>zim (w. 799 M) sebagai Imam ketujuh dan bukan Ismail, saudaranya. Kelompok

Syi'ah *Is/na> Asyariyah* menjadi mayoritas saat ini yang pusatnya berada di Iran.

Imam Al-Ka>zim meneruskan metode ayahnya dalam menyiarkan mazhab Ahlulbait dengan mendidik ratusan ulama hadis, tafsir dan muballig di bidang agama. Dalam menyikapi perkembangan Islam di masanya, Ia menekankan pentingnya sebuah perombakan pemikiran akidah masyarakat dan memerangi aliran-aliran yang menyimpang dari rel Islam. Sekalipun ia hidup di tengah permusuhan dinasti Abbasiyah mulai dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur (750-775M), Al-Mahdi (775-785M), Musa Al-Hadi (785-786M) hingga Harun al-Rasyid (786-809M), namun tidak menyurutkan tekadnya mengembangkan ajaran mazhab Syi'ah yang diwariskan dari ayah dan kakeknya.

Transformasi Syi'ah Mazhab ke Syi'ah Teologi

Pada awalnya, kelompok Syi'ah lebih menonjol sebagai gerakan politik, bukan sebagai golongan atau aliran dalam teologi. Namun karena Syi'ah menjadikan masalah "ima>mah" atau siapa yang pantas menjadi penerus kepemimpinan Rasulullah, sebagai bagian dari iman, maka dalam aspek ini mereka telah masuk ke dalam wilayah teologi. Pergeseran Syi'ah dari mazhab fikih yang tercermin dari ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Imam Ja'far al-S}adiq menjadi sebuah ajaran teologi berawal dari munculnya sebuah kelompok kecil dari sekte Syi'ah *gula>t* (sesat) dari kalangan mutakallimin yang meyakini bahwa Ima>mah sudah ditetapkan oleh Allah dari keturunan Ahlulbait, dan turun temurun dari keturunan Husain ke bawah hingga hari kiamat, dimana penunjukannya ditetapkan oleh nas atau wasiat. Doktrin atas Ima>mah menegaskan bahwa Rasulullah saw. dengan jelas menyatakan Imam 'Ali bin Abi>T}alib, sesuai ketetapan Allah adalah *wa>s}i* (yang diberi wasiat untuk melanjutkan kepemimpinan), kemudian dilanjutkan oleh keturunan 'Ali dan Fa>timah.

¹⁶Abu Al-Fath Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 1992). h. 221

¹⁷Al-Syahrastani, *Milal wa al-Nihal*, h. 191

Teologi ima>mah menjadi bagian terpenting dari akidah Syi'ah *Is|na> Asyariah*. Hal tersebut bukan hanya karena para Imam dinilai memiliki kemuliaan tersendiri sebagai keturunan Rasulullah, melainkan penunjukan seorang Imam berdasarkan dua prinsip dasar, pertama: Nas atau perpindahan Ima>mah berdasarkan nas yang jelas, dan dengan nas tersebut seseorang mendapatkan julukan Imam, tanpa harus menduduki jabatan politik atau khilafah. Kedua: Ima>mah otomatis memiliki ilmu atau ilham yang langsung dari Tuhan serta berpindah dari satu Imam kepada Imam lainnya. Dengan begitu Imam pada setiap zaman menjadi sumber pengetahuan atau guru spiritual bagi pengikutnya.¹⁸

Syi'ah telah memformulasikan akidah dalam tiga prinsip utama, yaitu tauhid, kenabian, dan hari kebangkitan. Dari prinsip dasar tauhid, muncul prinsip keadilan ilahi, dan dari prinsip kenabian, muncul prinsip imamah. Sistematika ini pada dasarnya mengikuti kaidah *idkhalu al-juz'i ila> al-kul* (menyertakan yang partikular kepada yang universal). Dengan demikian, berkembang menjadi lima prinsip, yaitu: *al-tauhji>d*, *al-nubuwwah*, *al-ima>mah*, *al-'adl*, dan *al-ma'a>d*.¹⁹

Pemikiran Imamah antara Politik dan Teologi

Imam dalam pandangan Syi'ah adalah orang yang paling memiliki otoritas ilmu-ilmu keislaman. Imam diposisikan sebagai penafsir syariat, penjelas bagi hukum-hukum Islam dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan manusia. Karena itu, Imam diyakini sebagai peletak fondasi ilmu-

ilmu keislaman.²⁰ Ilmu tersebut dimiliki oleh Imam melalui dua jalan. Pertama, diperoleh dari Nabi Muhammad saw. melalui perantara Imam sebelumnya. Kedua, melalui ilham yang diberikan oleh Allah swt.²¹ Dengan adanya ilham ini, Imam mampu mengetahui berbagai macam hal, baik tentang peristiwa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi.

Dalam pandangan Syi'ah, jabatan Imamah bukan hanya jabatan formal material, tetapi juga memiliki otoritas kepemimpinan spiritual ruhaniah. Jabatan Imamah menurut mereka sejajar dengan *nubuwwah*, yakni sama-sama berdasarkan ketetapan ilahi.²² Hal yang membedakan keduanya hanya bahwa imamah tidak membawa syariat baru, tetapi memiliki kewajiban menjaga agama Islam, memperkenalkan, mengajarkan, menyampaikan dan membimbing manusia kepada ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Imamah bagi kalangan Syi'ah adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin masyarakat.

Dalam teori *al-Imamah* menurut Syi'ah *Is|na> 'Asyariah* bahwa pengganti dan penerus kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah saw., terbatas kepada 'Ali bin Abi> T}a>lib dan dilanjutkan oleh anaknya H}asan dan H}usain bin 'Ali, kemudian garis keturunan H}usain hingga sampai kepada Imam Keduabelas yang diyakini menghilang sejak kecilnya pada tahun 873 M. Syi'ah *Is|na> 'Asyariah* berkeyakinan, bahwa Imam ini menghilang untuk sementara waktu dan akan kembali sebagai al-Mahdi yang langsung memimpin umat.

²⁰Muhammad al-Musawi, *Maz}hab Syi'ah: Kajian al-Qur'an dan Sunnah* (Bandung: Muththahari Press, 2005), h. 257.

²¹Muh}ammad Ibra>hi>m al-'Asal, *al-Syi>'ah al-Is|na 'Asyariyyah wa Manhajuhum fi> Tafsir al-Qur'a>n al-Kari>m* (Mis}r: Da>r Mans}u>r, 2007), h. 80-81.

²²Ibra>hi>m al-'Asal, *al-Syi'ah al-Is|na 'Asyariyyah*, h. 80.

¹⁸S.H.M Jafri, *Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syi'ah dari Saqifah sampai Imamah* (Jakarta:Pustaka Hidayah, 1989), h : 384

¹⁹Tim Ahlulbait Indonesia, *Buku Putih Madzhab Syi'ah: Menurut Para Ulama Muktabar* (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2012), h.15.

Oleh sebab itu, Ia disebut Imam yang bersembunyi (*al-Ima>m al-Musta'ir*) atau Imam yang dinanti (*al-Ima>m al-Muntaz}ar*). Menurut kalangan Syi'ah, selama Imam Mahdi bersembunyi, ia memimpin umat melalui raja-raja yang memegang kekuasaan dan para ulama mujtahid Syi'ah.²³

Ketiadaan Imam atau gaibnya Imam Keduabelas pada kelompok Syi'ah menimbulkan krisis besar dalam pemikiran politiknya, sebab dengan ketiadaan Imam yang menjadi panutan ummat, maka memunculkan kebingungan di kalangan mereka, antara menarik diri dari pentas politik secara menyeluruh hingga kembalinya Imam yang gaib atau mengembangkan teori politik Syi'ah dengan membolehkan para fakih untuk menduduki posisi pemerintahan sebagai bentuk pendelegasian wewenang.

Dalam literatur Syi'ah pada kurun waktu abad pertama dan kedua Hijriyah, tidak didapati adanya tuntutan pendelegasian Imam. Hal tersebut karena para Imam, mulai dari Imam 'Ali bin Abi> T}a>lib hingga wafatnya Imam ke 11 yaitu H}asan bin 'Alî (846–874 M), juga dikenal dengan H}asan al-Askari masih bersama mereka. Namun dengan gaibnya Imam Keduabelas yaitu Muh}ammad bin H}asan (sejak tahun 868 M), yang juga dikenal dengan Al-Mahdi Al-Muntaz}ar, para pemikir Syi'ah dihadapkan pada kondisi baru yang memaksa mereka untuk mempertahankan kepemimpinan Imamah melalui sosok lain. Diyakini oleh kalangan Syi'ah bahwa Imam Keduabelas hilang sewaktu masih kecil di dalam gua yang terdapat di Samarra (Irak). Menurut mereka, selama Imam itu bersembunyi, kepemimpinan umat dilakukan oleh raja-raja yang memegang kekuasaan dan para ulama

mujtahid Syi'ah²⁴ yang kemudian dikenal dalam konsep *wila>yat al-Faqi>h*.

Wila>yat al-Faqi>h antara Doktrin Teokrasi Klasik dan Negara Demokrasi Modern

*Wila>yah al-Faqi>h*²⁵ adalah konsep politik Islam versi Syi'ah yang merupakan poros sentral dari pemikiran politik Syi'ah kontemporer. Sebuah sistem politik yang mengadopsi sistem politik berbasis perwalian, yang bersandar pada seorang fakih yang adil dan kapabel untuk memegang pimpinan pemerintahan. Kata *wila>yah* dalam *wilayah al-Fakih* berarti pemerintahan dan administrasi/pengelolaan. Sebagian orang meletakkan makna ini untuk mendapatkan pengertian; pengendalian/kontrol, penguasaan, jabatan, hakim, dan kekuasaan tertinggi yang menunjukkan otoritas *wa>li* (sang pembawa wilayah) atas *mawla> alaih* (orang yang menggantung pada atau menjadi obyek wilayah).²⁶

Konsep *wila>yah al-Faqi>h* merupakan terobosan baru dari kebekuan yang dialami oleh masyarakat Syi'ah akibat konsep *gaibah kubra>*, sebab konsep Imamah yang melewati nas dan wasiat sudah tidak mungkin lagi dipraktekkan akibat terputusnya mata rantai Imamah pada Imam ke-12 yang sedang gaib. Sehingga rekonstruksi pemikiran politik sebagai jalan keluar dari kemandegan dan kebekuan lazim dilontarkan oleh para elit pemikir

²⁴Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya, jilid 1* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1980) h. 99.

²⁵Konsep wilayah al-Fakih merupakan konsep yang diadopsi oleh Imam Khomeini yang sebelumnya ditawarkan oleh ulama kubu reformis ushului, yang kemudian diaplikasikan dalam system pemerintahan Republik Islam Iran. Lihat: Malik al-'A>mili>, *Ittifa>q al-Kalimah baina Ulama> al-Ummah ala al-Wilayat al-Fakih al-Ammah* (Beirut: Dar al-Hadi, 2006), h. 130

²⁶Mahdi Hadavi Tehrani, *Wilayah al-Fakih*, Terj. Rudy Mulyono, Negara Ilahiyah (Jakarta: al-Huda, 2004), h. 38

²³Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya, jilid 1*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1980) h. 99.

(*munadzdzirun*) Syi'ah, untuk menjaga entitas Syi'ah dari kepunahan.²⁷ Oleh karena itu, ulama kontemporer Syi'ah *Is'na>'Asyariah* menegaskan bahwa selama masa penantian datangnya Imam yang gaib, kepemimpinan politik dan pemerintahan harus diisi oleh seorang ulama fakih yang adil, berilmu dan saleh. Bahkan dengan kepemimpinan *wila>yah al-Faqi>h* menjadi konsekuensi logis dari sistem kepemimpinan atau imamah yang gaib.²⁸ Dan diakui bahwa konsep ini tidak hanya bergulir dalam tataran wacana akan tetapi telah membumi dalam sistem negara di Iran.

Menurut keyakinan Syi'ah *Ima>miyah*, dalam system *wila>yah al-Faqi>h*, kalangan ulama menduduki posisi sebagai pengawal, penafsir maupun pelaksana hukum-hukum Tuhan. Kedudukan dan fungsi yang sangat spesifik dan istimewa ini bertujuan agar cita-cita menegakkan keadilan di muka bumi berdasarkan hukum Tuhan dapat direalisasikan secara baik dan benar. Di samping itu, terdapat kaitan yang sangat erat antara konsep imamah dan konsep *wila>yah al-Faqi>h*, keduanya merupakan pelanjut bagi misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Jika para imam berkewajiban membimbing umat setelah berakhirnya “siklus wahyu”, artinya setelah wafatnya Rasulullah saw., maka para fakih bertugas membimbing umat setelah berakhirnya “siklus imamah”, meski terdapat perbedaan, jika para imam memiliki sifat maksum, maka para fakih tidak memiliki sifat *is}mah* atau atribut-atribut istimewa lainnya sebagaimana yang dimiliki para imam.

Pokok-pokok pikiran mengenai *wila>yah al-Faqi>h* dijelaskan secara rinci

²⁷Khalid Muslih, Kaprodi Aqidah Filsafat pada Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur. Wawancara via whatsapp tanggal 10 Agustus 2020.

²⁸Kamaluddin Nurdin Marjuni, *Al-Firaq al-Syi'iyah wa Usuluha al-Siyasiyah wa Mauqif Ahli Sunnah Minha* (Kuala Lumpur: USIM, 2009). H. 97
156

oleh Ayatollah Khomeini dalam bukunya *al-Huku>mah al-Isla>miyah* (Pemerintahan Islam). Dijelaskan bahwa penunjukkan Nabi atas Ali r.a. sebagai penggantinya memiliki kewenangan, tidak hanya membuat pernyataan-pernyataan mengenai keimanan dan hukum semata, tetapi lebih dari itu, sebagai pengganti Nabi, Ali r.a. wajib melaksanakan hukum dan juga menjalankan pemerintahan Islam. Dan selama Imam Mahdi belum turun (gaib), maka kalangan Syi'ah harus tampil memimpin masyarakat, sebab al-Qur'an dan sunnah Nabi telah mengisyaratkan adanya dua kualifikasi bagi seorang pemimpin, yaitu ahli dalam pengetahuan hukum Islam dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menegakkan keadilan. Selama ketiadaan Imam Mahdi, pengikut Syi'ah harus dan dibenarkan mencari kandidat pemimpin diantara para ulama yang mampu memerintah sesuai syariat. Karena itu, dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai syariat Islam agar semua tindakan hukum harus sesuai dengannya, dan tentu saja, syarat-syarat tersebut hanya bisa dipenuhi dan dimiliki oleh para ulama yang dikategorikan sebagai figur yang paling siap untuk memimpin atau memerintah masyarakat Islam.²⁹

Kekuasaan *wila>yah al-Faqi>h* sebagaimana dijelaskan oleh Imam Khomaiini, tergolong *wilayah muthlaqah*, sebab batasan wilayah mereka adalah seluruh wilayah Rasulullah dan para Imam menyangkut wilayah dalam bidang pengetahuan (fatwa), bidang keagamaan, sosial, ekonomi, serta militer dan kekuasaan lainnya. Karena itu, *wila>yah al-Faqi>h* juga bertindak sebagai Pemimpin Agung yang bertanggungjawab penuh atas segala kebijakan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah Iran, disamping sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan

²⁹Ayatollah Khomeini, *al-Huku>mah al-Isla>miyah* (Teheran: Jam'iyah al-Ma'arif al-Islamiyah, 2011),h. 23-46.

Badan Intelijen Negara Iran yang memiliki kuasa mutlak untuk menyatakan perang. Adapun posisi Presiden, maka wilayahnya tergolong 'amah (publik), sebab ia merupakan orang kedua di dalam kekuasaan negara. Presiden bertanggungjawab atas konstitusi negara dan juga memastikan serta melaksanakan kekuasaan eksekutif, namun Presiden tidak memiliki kekuasaan atas perkara yang ada di bawah kekuasaan Pimpinan Agung (*wa>li al-Faqi>h*).

Dalam prakteknya, sistem *wila>yah al-Faqi>h* mirip dengan sistem kerajaan; dimana raja dipersepsikan sebagai: *The King can do no wrong* (tidak bisa salah dan disalahkan) dan bisa menetapkan atau membatalkan apa saja sesuai dengan apa yang dikehendaki. Seluruh kekuasaan di atas memperlihatkan tinggi dan luasnya peranan ulama dalam sistim pemerintahan Iran, sehingga *wa>li al-Faqi>h* dengan kekuasaannya dapat menentukan perihal kehidupan kenegaraan secara utuh di tangannya, dan ini membuktikan bahwa Iran sebagai negara teokrasi.

Pemikiran politik yang dikonsepsikan oleh Imam Khomeini yang dibungkus dalam konsep *wila>yah al-Faqi>h* telah dijadikan dasar bagi pengukuhan sistem teokrasi. Namun praktiknya dalam kehidupan bernegara modern, Khomeini juga memformulasikan demokrasi agama, karena pemerintahan Islam menurut Khomeini hanya berjalan jika terdapat perpaduan antara legitimasi Tuhan dan penerimaan umat. Karena itu perpaduan antara *wilayah ilahiyah* dan kepentingan manusia disebut sebagai model teodemokrasi, sebuah pertemuan antara teokrasi dan demokrasi. Dalam eksperimen teodemokrasi seperti di Iran, *wila>yah al-Faqi>h* mampu merepresentasikan otoritas ulama, sementara mekanisme pemilu dengan melibatkan rakyat mewakili representasi

demokrasi.³⁰ Meski demikian, sistem teokrasi yang diterapkan di Iran, dalam prakteknya tidak bisa disebut teokrasi mutlak, sebab pemilihan *wa>li al-Faqi>h* dinilai sudah tidak berdasarkan teks dan wasiat, akan tetapi melalui pemilihan *Majlis Khubara>* yang terdiri dari para *Fuqahā Mujtahidin* yang dipilih oleh rakyat.

Sistem politik yang digunakan di Iran, tidak serta merta dapat diperaktekkan di negara muslim lainnya, khususnya negara mayoritas Sunni. Sistem teodemokrasi yang dijalankan di Iran sangat bertolakbelakang dengan sistem demokrasi yang dikembangkan oleh kalangan Sunni, khususnya yang masih memegang teguh demokrasi liberal. Dalam konsep demokrasi liberal, kekuasaan mutlak berada di tangan rakyat, sedangkan dalam demokrasi Islami yang diterapkan di Republik Islam Iran, kekuasaan tertinggi berada di tangan kaum ulama melalui konsep *wila>yah al-Faqi>h*.

Karena itu, sistem politik teodemokrasi yang dianut oleh Iran tidak mungkin atau bahkan mustahil dapat diterapkan di negara mayoritas Sunni. Meski demikian, seruan rekonsiliasi Syiah-Sunni tidak harus terhenti hanya karena perbedaan sistem politik. Pada prinsipnya, penyatuan umat Islam seperti sering dikampanyekan oleh elit politik Iran, tidak harus menganut sistem politik yang sama, melainkan harus dibangun di atas pondasi kepentingan yang sama, khususnya dari sisi ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global, sekalipun berbeda dari sisi mazhab atau bahkan teologi.

PENUTUP

1. Syiah yang berarti pengikut dan pendukung sudah dikenal sejak sebelum datangnya Islam, namun dalam perkembangannya menjadi pendukung

³⁰Muhammad Qasim, Dosen *AL-Moustafa International University of Qum-Iran*, Wawancara via Whatsapp tanggal 31 Agustus 2020

fanatik ‘Ali bin Abi> T}a>lib r.a dan keluarga Ahlulbait dan meyakini sebagai khalifah/Imam pertama atas dasar nas dan wasiat Nabi serta menaati pemimpin yang diangkat dari keluarga dan keturunannya, baik dalam kehidupan dunia maupun keagamaan.

2. Munculnya kelompok Syi’ah tidak bisa dipisahkan dengan isu politik yang mengitari pengangkatan khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Pendukung ‘Ali bin Abi> T}a>lib mengklaim bahwa jabatan kepala negara bukanlah hak tiap orang Islam dan bukan juga hak tiap orang Quraisy, akan tetapi hak monopoli 12 Imam dari Ahlulbait keturunan ‘Ali bin Abi> T} yang diyakini mendapatkan wasiat dari Rasulullah. Atas dasar ini, Syiah politik berubah menjadi aliran mazhab Syiah atau dikenal mazhab *Itsna> Asyariayah* yang dalam perkembangannya berubah menjadi Syiah teologi karena meyakini kemaksuman Imam Dua Belas.
3. Dalam pelaksanaan demokrasi di negara mayoritas Syiah seperti Iran, konsep teokrasi menjadi sangat kental, yang tercermin dari kepemimpinan Wali al-Faqih yang merepresentasikan Imam yang ghaib dan menjalankan tugas-tugas keagamaan dan kenegaraan sebagai pemimpin negara dan agama. Dari sini, Iran telah menjadi prototipe negara demokrasi Islam di bawah konsep *wilayah al-Fakih* yang menjalankan sistem politik teokrasi, dimana negara menganggap bahwa konstitusi, ideologi serta peraturan lainnya adalah berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Hanya saja, konsep politik seperti ini tidak harus ditransfer ke negara-negara muslim mayoritas Sunni, sebab jika ini dilakukan hanya akan memperpanjang sejarah konflik politik antara Syiah dan Sunni.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘A>mili, Malik, *Ittifa>q al-Kalimah baina Ulama> al-Ummah ala al-Wilayat al-Fakih al-Ammah*, Beirut: Dar al-Hadi, 2006
- Al-Asqalani, Ibnu H}ajar, *Muqaddimah Fath}u al Ba>ri*, Jilid 1, Qa>hirah: Da>r al-Risa>lah, 2013.
-Ibn H}ajar, *Tahdh}ib al-Tahdh}ib*, jilid I, Qahirah: D}ar al-Kita>b al-Isl}am}, 2004
- Al-‘Asal, Muh}ammad Ibra>hi>m, *al-Syi>’ah al-Is}na ‘Asyariyyah wa Manhajuhum fi> Tafsir al-Qur’a>n al-Kari>m*, Mis}r: Da>r Mans}u>r, 2007.
- Al-Asy’ari, Abu> al-H}asan bin Isma>’il, *Maqa>lat al-Isla>miyyi>n Wa ikhtila>f al-musallin*, Qahirah: al-Nahdah, 1969.
- Al-Daury, Muh}ammad ‘Abdul ‘Azi>z, *Muqaddimah fi> al-S}adr al-Isla>m*, Beiru>t: Markaz Dira>sat al-Wih}dah al-Isla>miyah, 2007.
- Al-Git}a, Muh}ammad Ka>s}i>f, *As}lu al-Syi>’ah wa Us}u>luha*, Beirut: Da>r al-Adw}a, 1991.
- Al-Musawi, Muhammad, *Maz}hab Syi>’ah: Kajian al-Qur’an dan Sunnah*, Bandung: Muththahari Press, 2005.
- Al-Nasyar, Ali Sami, *Nasy’atu al-Fikri al-Falsa>fi fi> al-Isla>m*, Jilid 3, Qa>hirah: Da>rul Maa>rif, 1968.
- Al-Nubakhti, Al-H}asan bin Musa, *Fira>q al-Syi>’ah*, Beiru>t: Mansyu>ra>t al-Rida, 2012.
- Al-Razi, Muh}ammad bin Abu> Bakar bin Abdu al-Qadir, *Mukht}ar as-S}ih}ah*, Cet. I, Beirut: al-Maktabah al-As}riyah, 1995.
- Al-Syahrastani, Abu Al-Fath Muhammad bin Abdul Karim, *al-Milal wa al-Nihal*, jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 1992.
- Dahal, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

- Jafri, S.H.M, *Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syi'ah dari Saqifah sampai Imamah*, Jakarta:Pustaka Hidayah, 1989.
- Khomeini, Ayatollah, *al-Huku>mah al-Isla>miyah*, Teheran: Jam'iyah al-Ma'>arif al-Islamiyah, 2011.
- Marjuni, Kamaluddin Nurdin, *Al-Firaq al-Syi'iyah wa Usuluha al-Siyasiyah wa Mauqif Ahli Sunnah Minha*, Kuala Lumpur: USIM, 2009.
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya, jilid 1*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1980.
- Tehrani, Mahdi Hadavi, *Wilayah al-Fakih*, Terj. Rudy Mulyono, Negara Ilahiyah, Jakarta: al-Huda, 2004.
- Tim Ahlulbait Indonesia, *Buku Putih Madzhab Syi'ah: Menurut Para Ulama Muktabar*, Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2012.
- Watt, W Montgomery, *Islam and the Integration of Society*, London: Routledge, 2008.
- Zahrah, Muh}ammad Abu, *Tari>kh al-Maz/a>hib al-Isla>miyyah*, Beiru>t: Da>r al-Fikr al-'Arabi, 2008.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy, *Teologi dan Ajaran Syi'ah Menurut Referensi Induknya*, Jakarta: Insist, 2014.

Wawancara:

- Marjuni, Kamaluddin Nurdin, Prof. Madya pada Universiti Sains Islam Malaysia, wawancara via whatsapp tanggal 5 September 2020.
- Muhammad Qasim, Dosen *AL-Moustafa International University of Qum-Iran*, Wawancara via Whatsapp tanggal 31 Agustus 2020
- Muslih, Khalid, Kaprodi Aqidah Filsafat pada Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur. Wawancara via whasapp tanggal 10 Agustus 2020.